



## BINA MARGA

### Sudah Pra Audit

DINAS Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu merupakan SKPD yang paling banyak



Ana Mariana

mendapt alokasi dana APBD. Untuk itu, sebelum dilaksanakan serah terima proyek, Dinas yang dipimpin Ana Mariana ST MM mengajukan permohonan pra-audit kepada Inspektorat Kapuas Hulu. Demikian juga dengan auditor dari BPK dan BPKP yang melaku-

kan audit rutin setiap tahun anggaran.

"Pra audit yang kami ajukan kepada inspektorat menindatkan juti surat edaran

◆ Ke Halaman 27 kolom 5

### Sudah Pra Audit

Sambungan dari halaman 17

Bupati Kapuas Hulu No. 700/2035/Setda/P2-B Perihal Penyampaian Berita Acara Serah Terima Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2014. Permohonan ini kami ajukan setiap berakhirnya pelaksanaan proyek," tutur Ana Mariana, Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Selain itu inspektorat, kata Ana lagi, auditor seperti BPK dan BPKP juga selalu melakukan audit setiap tahun. Hanya saja dengan adanya surat edaran ini, dinas diharapkan akan lebih teliti lagi.

"Kami tidak anti diperiksa. Jika ada yang kurang, kami mohon ditunjukkan kekurangan apa dan dimana

dan apa, lalu bagaimana memperbaikinya. Sehingga solusinya jelas jika memang ada kesalahan," ungkap Ana.

Diakui Ana, setiap ada serah terima proyek, pra audit tetap dilakukan dan ini merupakan komitmen Dinas Bina Marga agar bekerja tidak sembarangan dan asal-asalan. Sebelumnya memang tidak ada pra audit, tapi pihaknya tetap diaudit oleh Inspektorat, BPK dan BPKP. "Saat ini kami sedang benahi masalah aset. Masalah aset di Bina Marga dan Perairan cukup rumit dan cukup banyak," kata Ana.

Itu terjadi lantaran lantaran dinas bina marga sebelumnya bukan bernama Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, akan tetapi

sering berganti nama. Mulai dari Kimpraswil, Dinas PU hingga Bina Marga. Akibatnya penyimpanan data dan SDM penataan aset agak lemah. Selain itu banyak bantuan dari pusat atau provinsi yang dokumennya tak bisa dilacak lagi oleh kabupaten karena memang tak ada.

"Masalah aset jalan karena NJOP tidak ada nilai jual yang bisa ditelusuri atau nilai jalan sebenarnya berapa. Makanya kami berupaya menyelesaikan dengan menerjunkan staf untuk menghitung NJOP atau mendata ulang target kami aset-aset yang bernilai nol harus bisa terselesaikan," papar Ana. Seryam mengatakan, pihaknya optimis masalah pendataan aset bisa diselesaikan secara bertahap. (aan)